



SALINAN

BUPATI BOYOLALI,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DAN PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DAN PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3.....

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. IKU Pemerintah Daerah;
- b. IKU Perangkat Daerah;
- c. *cascade* IKU;
- d. penetapan dan penggunaan IKU; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II IKU PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Daerah merupakan ukuran keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah diukur dengan indikator kinerja tujuan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.
- (3) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III IKU PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) IKU Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah diukur dengan indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV CASCADE IKU

Pasal 6

- (1) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 perlu dijabarkan sampai pada tingkat Program.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perlu dijabarkan sampai pada tingkat sub Kegiatan.

(3) Penjabaran IKU.....

- (3) Penjabaran IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *cascade* IKU.
- (4) *Cascade* IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) *Cascade* IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penetapan IKU Perangkat Daerah.

BAB V PENETAPAN DAN PENGGUNAAN IKU

Pasal 7

Penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan/atau Renstra, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 8

IKU digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU.
- (2) Guna kelancaran tugas pembinaan dan pengembangan, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi akuntabilitas kinerja.
- (3) Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian Program, serta pelaporan pertanggungjawaban Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

(4) Evaluasi.....

- (4) Evaluasi atas capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 21 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,**

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,**



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 100 TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN
 BOYOLALI DAN PERANGKAT
 DAERAH DI KABUPATEN
 BOYOLALI TAHUN 2021-2026

IKU PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN 2021-2026

Visi : Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi (melangkah dan menata bersama penuh totalitas)

No	Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6
Misi 1. Boyolali meneruskan pro investasi, maju, sinergi dan berkelanjutan						
1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	1. Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	Alasan	: merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan	1. DPMPSTP 2. DLH
				Formulasi Perhitungan	: $r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$ dimana r = Laju pertumbuhan ekonomi Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)	3. DPU PR 4. Setda 5. BKD 6. Disdagperin 7. Disporapar 8. Dishub

No	Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6
					$Y_i(t-1) = \text{PDRB atas dasar harga konstan tahun ke } t-1 \text{ (nominal)}$	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik	
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	2. Tingkat Kemiskinan	Persen	Alasan	: merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat	Dinkopnaker
				Formulasi Perhitungan	$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)$ <p>dimana</p> <p>P_0 = Persentase penduduk miskin</p> <p>z = Garis kemiskinan</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan</p> <p>q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan</p> <p>n = Jumlah penduduk</p>	

No	Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik	
Misi 2. Boyolali sehat, tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya						
3	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	3. Indeks Pembangunan Manusia	Angka	Alasan	: untuk menunjukkan kualitas hidup masyarakat	1. Disporapar 2. Dinarpus 3. Disdikbud 4. Setda 5. DP2KBP3A 6. Dinkes 7. RSUD
				Formulasi Perhitungan	: $IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} + I \text{ Pendidikan} + I \text{ Pengeluaran}} \times 100$ dimana IPM = Indeks Pembangunan Manusia I kesehatan = Angka Harapan Hidup I pendidikan = Angka Harapan Lama Sekolah; I pengeluaran = Angka PDB Perkapita	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik	

No	Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Penanggung jawab	
1	2	3	4	5		6	
4	Meningkatnya keberdayaan sosial	4. Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	Alasan	:	Untuk menunjukkan peran aktif perempuan di bidang ekonomi dan politik	DP2KBP3A
				Formulasi Perhitungan	:	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$	
				Tipe Penghitungan	:	Non kumulatif	
				Sumber data	:	Badan Pusat Statistik	
		5. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka	Alasan	:	Untuk menunjukkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
				Formulasi Perhitungan	:	Penjumlahan penyandang masalah kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan	
				Tipe Penghitungan	:	Non kumulatif	
				Sumber data	:	Dinas Sosial	

No	Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6
		6. Indeks Desa Membangun	Nilai	Alasan	: Untuk menunjukkan tingkat ketepatan pembangunan desa berdasar pada karakteristik masing-masing	Dispermasdes
				Formulasi Perhitungan	: $IDM = \frac{1}{3}(IKS + IKE + IKL)$ dimana IDM = Indeks desa membangun IKS = Indeks ketahanan Sosial IKE = Indeks ketahanan ekonomi IKL = Indeks ketahanan lingkungan	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
5	Meningkatnya ketahanan sosial	7. Angka Konflik Sosial	Angka	Alasan	: Untuk menunjukkan tingkat potensi dan penanganan konflik sosial guna mewujudkan ketahanan sosial	1. Satpol PP 2. Kesbangpol
				Formulasi Perhitungan	: Jumlah konflik sosial yang terjadi dalam satu tahun	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	

No	Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6
				Sumber data	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8. Indeks Risiko Bencana	Nilai	Alasan	: untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten guna mewujudkan ketahanan sosial	1. BPBD 2. Satpol PP
				Formulasi Perhitungan	: $\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{vulnerability}}{\text{capacity}}$ <p>dimana</p> <p>Risk = Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu</p> <p>Hazard = suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan</p> <p>Vulnerability = suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya</p>	

No	Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6
					kemampuan dalam menghadapi bahaya	
					Capacity = Tingkat ketahanan berdasarkan tujuh prioritas	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
Misi 3. Boyolali kota susu, lumbung pangan nasional						
6	Meningkatnya kesejahteraan petani	9. Nilai Tukar Petani	Angka	Alasan	: Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani	1. Dispartan 2. Disnakkan 3. DKP 4. Disdagperin 5. DPU PR
				Formulasi Perhitungan	: $NTP = \frac{It}{Ib} \times 100\%$ dimana NTP = Nilai Tukar Petani It = Indeks harga yang diterima petani Ib = Indeks harga yang dibayar petani	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik	

No	Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Penanggung jawab
1	2	3	4	5			6
Misi 4. Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya							
7	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	10. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Angka	Alasan	:	untuk menunjukkan tingkat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan baik	Semua Perangkat Daerah
				Formulasi Perhitungan	:	Penjumlahan dari hasil skoring terhadap Opini laporan keuangan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, kematangan penataan perangkat daerah, inovasi daerah, prestasi kerja pemerintah daerah rasio belanja perjalanan dinas, indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Gini Ratio	
				Tipe Penghitungan	:	Non kumulatif	
				Sumber data	:	Sekretariat Daerah	
Misi 5. Boyolali tersenyum, tumbuh, mandiri dan berdaya saing							
8	Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali	11. Indeks <i>Smart City</i>	Angka	Alasan	:	Untuk menunjukkan tingkat penyediaan sarana prasarana kemajuan teknologi sehingga menunjang kenyamanan hidup masyarakat.	1. DLH 2. Diskominfo 3. DPKP 4. DPU PR
				Formulasi Perhitungan	:	Hasil Evaluasi <i>Smart City</i> dari Kementerian Komunikasi dan Informatika	

No	Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Kementerian Komunikasi dan Informatika	
		12.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	Alasan	: Untuk menunjukkan tingkat kualitas lingkungan hidup guna menunjang kenyamanan hidup masyarakat	DLH
				Formulasi Perhitungan	: $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ dimana IKLH = Indeks kualitas lingkungan hidup IKA = Indeks kualitas air IKU = Indeks kualitas udara IKTL = Indeks kualitas tutupan lahan	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Dinas Lingkungan Hidup	

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 100 TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN
 BOYOLALI DAN PERANGKAT
 DAERAH DI KABUPATEN
 BOYOLALI TAHUN 2021-2026

IKU PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2021-2026

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
1	Sekretariat Daerah				
	1. Meningkatnya peran perusahaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya	Persentase peningkatan peran perusahaan	persen	Alasan	: Menunjukkan tingkat peran perusahaan dalam meningkatkan Laju pertumbuhan ekonomi
				Formulasi Perhitungan	: Jumlah perusahaan yang dilibatkan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dibagi jumlah perusahaan
				Tipe Penghitungan	: Kumulatif
				Sumber data	: Sekretariat Daerah
	2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah		Alasan	: Menunjukkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang
				Formulasi Perhitungan	: $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana HLS _a ^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
					E_t^i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia ($a, a + 1, \dots, n$) FK = Faktor koreksi pesantren
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik
	3. Meningkatnya nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan		Alasan	: Menunjukkan tingkat pelestarian budaya benda dan tak benda
				Formulasi Perhitungan	: Jumlah budaya benda dan tak benda yang dilestarikan dibagi jumlah budaya benda dan tak benda yang seharusnya dilestarikan
				Tipe Penghitungan	: Kumulatif
				Sumber data	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Alasan	: Menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah terutama dalam pengukuran kinerja
				Formulasi Perhitungan	: Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Indeks Reformasi Birokrasi		Alasan	: Menunjukkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah
				Formulasi Perhitungan	: Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
				Alasan	: Menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
				Formulasi Perhitungan	: Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Kementerian Dalam Negeri
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Alasan	: Menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
				Formulasi Perhitungan	: Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Sekretariat Daerah
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Alasan	: Menunjukkan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pencapaian kinerja perangkat daerah
				Formulasi Perhitungan	: Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Kementerian Dalam Negeri

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
3	Inspektorat				
	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan		Alasan	: Menunjukkan tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
				Formulasi Perhitungan	: Perhitungan bobot kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu: a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; b. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan d. efektivitas sistem pengendalian intern
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Pemeriksa Keuangan
	2. Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah	Nilai Survei Penilaian Integritas		Alasan	: Menunjukkan tingkat kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi
				Formulasi Perhitungan	: Hasil Survei penilaian integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Komisi Pemberantasan Korupsi
4	Dinas Kesehatan				
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup		Alasan	: Menunjukkan kinerja Pemerintah dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
				Formulasi Perhitungan	: Perhitungan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Harapan lama Sekolah		Alasan	: Menunjukkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang
				Formulasi Perhitungan	: $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana HLS _a ^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E _i ^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik
	2. Meningkatnya nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan		Alasan	: Menunjukkan tingkat pelestarian budaya benda dan tak benda
				Formulasi Perhitungan	: Jumlah budaya benda dan tak benda yang dilestarikan dibagi jumlah budaya benda dan tak benda yang seharusnya dilestarikan
				Tipe Penghitungan	: Kumulatif

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
				Sumber data	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	1. Meningkatnya nilai investasi	Realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing		Alasan	: Menunjukkan nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sebagai salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi
				Formulasi Perhitungan	: Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tahun berjalan
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
	2. Meningkatnya kenyamanan transportasi	Persentase jalan dalam kondisi mantap		Alasan	: Data dasar pengajuan dana alokasi khusus
				Formulasi Perhitungan	: Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dibagi total panjang Kabupaten dikalikan 100%
				Tipe Penghitungan	: Kumulatif
				Sumber data	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian	Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian		Alasan	: Menunjukkan tingkat perekonomian sektor pertanian
				Formulasi Perhitungan	: Data laju pertumbuhan produk domestik regional bruto sektor pertanian
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
1	4. Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis <i>smartness</i>	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan		Alasan	: Memenuhi standar pelayanan minimum bidang air minum
				Formulasi Perhitungan	: Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum layak dan berkelanjutan dibagi Jumlah penduduk yang direncanakan mendapatkan akses air minum dikalikan 100%
				Tipe Penghitungan	: Kumulatif
				Sumber data	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan		Alasan	: Memenuhi standar pelayanan minimum sanitasi layak
				Formulasi Perhitungan	: Jumlah penduduk yang mendapatkan akses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi jumlah penduduk yang direncanakan mendapatkan akses sanitasi layak dan berkelanjutan dikalikan 100%
				Tipe Penghitungan	: Kumulatif
				Sumber data	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5. Meningkatnya kualitas bangunan dan penataan ruang	Persentase bangunan sesuai standar		Alasan	: Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menyediakan gedung publik yang memenuhi standar
				Formulasi Perhitungan	: Jumlah gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi dibagi jumlah total gedung Pemerintah Daerah dikalikan 100%
				Tipe Penghitungan	: Kumulatif
				Sumber data	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang		Alasan	: Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan ruang
				Formulasi Perhitungan	: Jumlah permohonan informasi tata ruang yang sesuai dibagi jumlah permohonan informasi tata ruang dikalikan 100%
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	1. Meningkatnya akses rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		Alasan	: Menunjukkan tingkat penyediaan rumah layak huni sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat
				Formulasi Perhitungan	: Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah seluruh rumah se kabupaten dikali 100 %
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2. Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis <i>smartness</i>	Luas kawasan kumuh		Alasan	: Menunjukkan tingkat penanganan kawasan kumuh sebagai salah satu tolak ukur kualitas lingkungan
				Formulasi Perhitungan	: Luasan kumuh yang ditangani dibagi jumlah luasan kumuh sesuai Keputusan Bupati dikali 100%
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan
1	2	3	4	5
8	Dinas Sosial			
	Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial		Alasan : Menunjukkan tingkat pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai upaya peningkatan kesejahteraan
				Formulasi Perhitungan : Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diberdayakan dibagi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang seharusnya diberdayakan x 100%
				Tipe Penghitungan : Non kumulatif
				Sumber data : Dinas Sosial
9	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja			
	1. Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka		Alasan : Menunjukkan tingkat pengangguran sebagai salah satu tolak ukur angka kemiskinan
				Formulasi Perhitungan : $TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Dimana: TPT = Tingkat pengangguran terbuka PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
				Tipe Penghitungan : Non kumulatif
				Sumber data : Badan Pusat Statistik
		Persentase peningkatan kepatuhan		Alasan : Menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja sebagai daya tarik calon pekerja sehingga mengurangi angka pengangguran

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
1	2	3	4	5		
		perusahaan atas hak-hak pekerja		Formulasi Perhitungan	: jumlah perusahaan yang memenuhi hak pekerja dibagi jumlah perusahaan	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	2. Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian	Persentase koperasi yang meningkat sisa hasil usahanya		Alasan	: Menunjukkan tingkat kesehatan koperasi sebagai salah satu pendukung perekonomian masyarakat	
				Formulasi Perhitungan	: Jumlah koperasi yang meningkat sisa hasil usahanya dibagi jumlah koperasi	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	
			Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya		Alasan	: Menunjukkan tingkat perkembangan usaha mikro sebagai salah satu pendukung perekonomian masyarakat
					Formulasi Perhitungan	: Jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan omset
					Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
					Sumber data	: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
	Meningkatnya nilai investasi	Realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing		Alasan	: Menunjukkan nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sebagai salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi	
				Formulasi Perhitungan	: Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tahun berjalan	

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
11	Dinas Lingkungan Hidup				
1	Meningkatnya peran perusahaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya	Persentase peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan		Alasan	: Menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam upaya pelestarian lingkungan
				Formulasi Perhitungan	: Jumlah perusahaan yang ramah lingkungan dibagi jumlah perusahaan
				Tipe Penghitungan	: Kumulatif
				Sumber data	: Dinas Lingkungan Hidup
2	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air		Alasan	: Menunjukkan tingkat kualitas air sebagai salah satu tolak ukur kualitas lingkungan hidup yang mendukung kenyamanan hidup
				Formulasi Perhitungan	: $IKA = \text{Persentase pemenuhan mutu air} * \text{bobot nilai}$
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Dinas Lingkungan Hidup
3	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara		Alasan	: Menunjukkan tingkat kualitas udara sebagai salah satu tolak ukur kualitas lingkungan hidup yang mendukung kenyamanan hidup
				Formulasi Perhitungan	: $IKU = 100 - (50/0.9 \times (IEU - 0.1))$
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
1	2	3	4	5			
	4 Meningkatkan kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan		Sumber data	: Dinas Lingkungan Hidup		
				Alasan	: Menunjukkan tingkat kualitas tutupan lahan sebagai salah satu tolak ukur kualitas lingkungan hidup yang mendukung kenyamanan hidup		
				Formulasi Perhitungan	: $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$		
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif		
	5 Meningkatkan penanganan/pengelolaan sampah	Persentase sampah yang tertangani			Sumber data	: Dinas Lingkungan Hidup	
					Alasan	: Menunjukkan tingkat penanganan sampah sebagai salah satu tolak ukur kualitas lingkungan hidup yang mendukung kenyamanan hidup	
					Formulasi Perhitungan	: Jumlah sampah yang ditangani dibagi jumlah sampah yang seharusnya ditangani kali 100%	
					Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
12	Dinas Perhubungan	Meningkatnya kenyamanan transportasi	Rasio konektivitas Kabupaten			Alasan	: Menunjukkan kinerja Pemerintah dalam penyediaan sarana transportasi antar wilayah
						Formulasi Perhitungan	: Perbandingan bobot trayek yang beroperasi dengan jumlah keseluruhan trayek yang ada di Kabupaten Boyolali
						Tipe Penghitungan	: Kumulatif
						Sumber data	: Dinas Perhubungan

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Meningkatnya pengendalian penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate)		Alasan	: menunjukkan tingkat keberhasilan pengendalian penduduk
				Formulasi Perhitungan	: $TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ Dimana: TFR = Angka kelahiran total <i>i</i> = kelompok usia 15-19,, 45-49 ASFR _{<i>i</i>} = Banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok usia ke <i>i</i>
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak	Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan		Alasan	: Menunjukkan kinerja Pemerintah dalam upaya meningkatkan angkatan kerja perempuan
				Formulasi Perhitungan	: Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan = (Angkatan kerja perempuan / populasi usia kerja) x 100
				Tipe Penghitungan	: Kumulatif
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik
	Angka kekerasan terhadap perempuan		Alasan	: Menunjukkan kinerja Pemerintah dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan	
			Formulasi Perhitungan	: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik,	

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
1	2	3	4	5		
					seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik	
				Status Kabupaten layak anak		
		Alasan	: Menunjukkan kinerja Pemerintah dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak			
		Formulasi Perhitungan	: Hasil evaluasi Kabupaten/Kota layak anak			
		Tipe Penghitungan	: Non kumulatif			
		Sumber data	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	1 Meningkatkan keberdayaan desa	Persentase kenaikan status desa		Alasan	: Menunjukkan tingkat perkembangan desa	
				Formulasi Perhitungan	: Nilai Indeks Desa Membangun seluruh desa di bagi jumlah desa dikali 100%	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	2 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Alasan	: Menunjukkan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pencapaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa
					Formulasi Perhitungan	: Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Kementerian Dalam Negeri
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat		Alasan	: Menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan
				Formulasi Perhitungan	: Hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Dinas Komunikasi dan Informatika				
	1 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Alasan	: Menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah terutama dalam penyediaan data terpusat dan publikasi data
				Formulasi Perhitungan	: Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	2 Terwujudnya <i>smart governance</i> Boyolali	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Alasan	: Menunjukkan tingkat penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
				Formulasi Perhitungan	: Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
1	2	3	4	5		
		Indeks keterbukaan informasi publik		Sumber data	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
				Alasan	: Menunjukkan tingkat informasi yang disampaikan kepada masyarakat sehingga memudahkan dalam pelayanan publik	
				Formulasi Perhitungan	: Hasil penilaian Keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Komisi Informasi Pusat	
	3 meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis <i>smartness</i>	Persentase layanan publik dan pengaduan <i>online</i> yang aktif			Alasan	: Menunjukkan tingkat penyediaan sistem pelayanan publik dan pengaduan yang dikelola
					Formulasi Perhitungan	: (Jumlah sistem pelayanan publik dan pengaduan <i>online</i> yang dikelola dibagi Jumlah sistem pelayanan publik dan pengaduan <i>online</i> yang ada) x 100%
					Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
Sumber data					: Dinas Komunikasi dan Informatika	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah		Alasan	: Menunjukkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang terutama pada pemanfaatan perpustakaan	
				Formulasi Perhitungan	: $HLS_a^t = FK \times \sum_{l=a}^n \frac{E_l^t}{P_l^t}$ dimana	

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
					HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik
	2 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		Alasan	: Menunjukkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area tata laksana bidang pengelolaan kearsipan
				Formulasi Perhitungan	: Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				
	1 Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor pariwisata		Alasan	: Menunjukkan tingkat pertumbuhan sektor pariwisata yang merupakan salah satu faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi
				Formulasi Perhitungan	: Data laju pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto sektor pariwisata
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
1	2	3	4	5		
	2 Meningkatkan kontribusi pemuda dalam pembangunan	Persentase pembinaan cabang olahraga		Alasan	: Menunjukkan sejauhmana pembinaan terhadap cabang olahraga untuk meningkatkan kontribusi pemuda dalam pembangunan	
				Formulasi Perhitungan	: Jumlah pembinaan cabang olahraga dibagi jumlah cabang olahraga yang seharusnya dibina	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan			Alasan	: Menunjukkan sejauh mana partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan untuk meningkatkan kontribusi pemuda dalam pembangunan
					Formulasi Perhitungan	: Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dibagi jumlah pemuda kali 100 %
					Tipe Penghitungan	: Kumulatif
					Sumber data	: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian					
	1 Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri		Alasan	: Menunjukkan tingkat pertumbuhan sektor industri yang merupakan salah satu faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi	
				Formulasi Perhitungan	: Data laju pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto sektor industri	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik	

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
1	2 Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor perdagangan		Alasan	: Menunjukkan tingkat pertumbuhan sektor perdagangan yang merupakan salah satu faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi
				Formulasi Perhitungan	: Data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor perdagangan
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik
	3 Meningkatkan stabilitas harga barang dan jasa	Indeks Harga Konsumen		Alasan	: Menunjukkan harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga yang akan mempengaruhi tingkat inflasi
				Formulasi Perhitungan	: $IHK = \frac{P_n}{P_o} \times 100$ Dimana: IHK = Indeks Harga Konsumen P _n = Harga sekarang P _o = Harga pada tahun dasar
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik
	4 Meningkatkan agro industri susu	Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu		Alasan	: Menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat dari agro industri susu
				Formulasi Perhitungan	: Pendapatan sektor agro industri susu dibagi pendapatan sektor agro industri kali 100%
				Tipe Penghitungan	: Kumulatif

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
1	2	3	4	5		
				Sumber data	: Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
20	Dinas Pertanian					
	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian		Alasan	: Menunjukkan tingkat pertumbuhan perekonomian sektor pertanian	
				Formulasi Perhitungan	: Data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik	
21	Dinas Peternakan dan Perikanan					
	1 Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian		Alasan	: Menunjukkan tingkat pertumbuhan perekonomian sektor pertanian	
				Formulasi Perhitungan	: Data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian	
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif	
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik	
		Persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan			Alasan	: Menunjukkan tingkat perekonomian sub sektor perikanan
					Formulasi Perhitungan	: Data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor perikanan
					Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
					Sumber data	: Badan Pusat Statistik

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
1	2 Meningkatkan kualitas susu	Jumlah perusahaan yang menerima produk susu Boyolali		Alasan	: Menunjukkan tingkat kualitas susu
				Formulasi Perhitungan	: Jumlah produksi susu yang diterima perusahaan
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik
22	Dinas Ketahanan Pangan				
	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan		Alasan	: menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi pada Pemerintah Daerah
				Formulasi Perhitungan	: $Y(j) = \sum aiXij$ Dimana <i>i</i> : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 <i>j</i> : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 <i>Yj</i> : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten /kota ke- <i>j</i> <i>ai</i> : Bobot masing-masing indikator ke- <i>i</i> <i>Xij</i> : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke- <i>i</i> pada kabupaten/kota ke- <i>j</i>
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Ketahanan Pangan

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
23	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah				
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Alasan	: Menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah terutama dalam perencanaan pembangunan
				Formulasi Perhitungan	: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Alasan	: Menunjukkan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pencapaian kinerja perangkat daerah
				Formulasi Perhitungan	: Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Kementerian Dalam Negeri
24	Badan Keuangan Daerah				
		Persentase pemanfaatan barang milik daerah		Alasan	: Menunjukkan tingkat pemanfaatan barang milik daerah guna mendukung laju perekonomian
				Formulasi Perhitungan	: Jumlah jenis barang milik daerah yang telah dimanfaatkan/Jumlah jenis barang milik daerah yang bisa dimanfaatkan
				Tipe Penghitungan	: Kumulatif
				Sumber data	: Badan Keuangan Daerah

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		Alasan	: Menunjukkan kualitas kerja tata kelola keuangan daerah
				Formulasi Perhitungan	: Perhitungan bobot terhadap 6 dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; b. Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah; d. Penyerapan anggaran; e. Kondisi keuangan daerah; dan f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Keuangan Daerah/Provinsi
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan		Alasan	: Menunjukkan tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
				Formulasi Perhitungan	: Perhitungan bobot kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu: a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
					d. Efektivitas sistem pengendalian intern
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Pemeriksa Keuangan
25	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah				
		Indeks profesionalitas pegawai		Alasan	: Menunjukkan kualitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya
				Formulasi Perhitungan	: Perhitungan bobot kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tugas jabatannya
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Kepegawaian Negara
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
		Angka potensi konflik		Alasan	: Menunjukkan tingkat potensi konflik sehingga dapat dilakukan tindak pencegahan dan merupakan salah satu tolak ukur ketahanan sosial
				Formulasi Perhitungan	: Penjumlahan hasil pemetaan potensi konflik yang terjadi pada masyarakat
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan
1	2	3	4	5
27	Satuan Polisi Pamong Praja			
		Angka potensi konflik		<p>Alasan : Menunjukkan tingkat potensi konflik sehingga dapat dilakukan tindak pencegahan dan merupakan salah satu tolak ukur ketahanan sosial</p> <p>Formulasi Perhitungan : Penjumlahan hasil pemetaan potensi konflik yang terjadi pada masyarakat</p> <p>Tipe Penghitungan : Non kumulatif</p> <p>Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja</p>
		Indeks kapasitas		<p>Alasan : Menunjukkan tingkat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana yang terjadi</p>
				<p>Formulasi Perhitungan : Skoring terhadap tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:</p> <p>a. perkuatan kebijakan dan kelembagaan;</p> <p>b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;</p> <p>c. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;</p> <p>d. penanganan tematik kawasan rawan bencana;</p> <p>e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;</p> <p>f. perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan</p> <p>g. pengembangan sistem pemulihan bencana.</p>
				<p>Tipe Penghitungan : Non kumulatif</p>

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
				Sumber data	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
		Indeks kapasitas		Alasan	: Menunjukkan tingkat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana yang terjadi
				Formulasi Perhitungan	: Skoring terhadap tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: a. perkuatan kebijakan dan kelembagaan; b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; c. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; d. penanganan tematik kawasan rawan bencana; e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; f. perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan g. pengembangan sistem pemulihan bencana.
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
29	Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang				
		Angka harapan hidup		Alasan	: Menunjukkan kinerja Pemerintah dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat
				Formulasi Perhitungan	: Perhitungan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik
30	Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris				
		Angka harapan hidup		Alasan	: Menunjukkan kinerja Pemerintah dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat
				Formulasi Perhitungan	: Perhitungan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik
31	Rumah Sakit Umum Daerah Simo				
		Angka harapan hidup		Alasan	: Menunjukkan kinerja Pemerintah dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat
				Formulasi Perhitungan	: Perhitungan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Badan Pusat Statistik
32	Kecamatan				
		Indeks Kepuasan Masyarakat		Alasan	: Menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan di Kecamatan
				Formulasi Perhitungan	: Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Kecamatan

No	Perangkat Daerah/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
1	2	3	4	5	
33	Semua Perangkat Daerah	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah		Alasan	: Menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
				Formulasi Perhitungan	: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
				Tipe Penghitungan	: Non kumulatif
				Sumber data	: Inspektorat Daerah

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 100 TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN
 BOYOLALI DAN PERANGKAT
 DAERAH DI KABUPATEN
 BOYOLALI TAHUN 2021-2026

CASCADE IKU
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN 2021-2026

Visi : Boyolali maju, meneruskan pro investasi (melangkah dan menata bersama penuh totalitas)

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
1	Boyolali Melanjutkan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan	1 Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatkan nilai investasi	1 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing	1 Program Promosi Penanaman Modal	1. Persentase promosi potensi investasi yang ditindak lanjuti dengan peninjauan kerjasama investasi	DPMPTSP
							2. Persentase realiasi investasi di wilayah utara	DPMPTSP
						2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	DPMPTSP
						3 Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Perizinan Investasi	DPMPTSP

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab				
						4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	DPMPTSP			
						5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	DPMPTSP			
						6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Dokumen Rencana Rinci Kawasan Potensial Investasi	DPU PR			
				2	Meningkatnya perusahaan yang ramah lingkungan	1	Persentase peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan	1	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktivitas investasi yang sesuai standar	DLH

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab	
							2	Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	DLH
							3	Persentase perusahaan yang ramah lingkungan	DLH
				3	Meningkatnya peran perusahaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya	Persentase peningkatan peran perusahaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah perusahaan pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan	Setda
				4	Meningkatnya pemanfaatan barang milik Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Persentase pemanfaatan barang milik Daerah	Program pengelolaan barang milik Daerah	Jumlah barang milik Daerah yang dimanfaatkan	BKD

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
				5 Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	1 Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi	Disdagperin
							2 Persentase informasi perdagangan barang yang harus diawasi.	Disdagperin
						2 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase rekomendasi perizinan pengembangan usaha toko modern yang difasilitasi	Disdagperin
						3 Program Pengembangan Ekspor	Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor	Disdagperin
						4 Program Standarisasi Perlindungan Konsumen	Prosentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang sudah tertib ukur	Disdagperin
				6 Meningkatkan stabilitas harga barang dan jasa	Indeks Harga Konsumen	1 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase koefisiensi variasi harga antar waktu	Disdagperin
							2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab			
							2	persentase pedagang yang tertib lokasi	Disdagperin		
							3	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar	Disdagperin		
				7	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1	Persentase industri kecil menengah yang terlatih	Disdagperin	
							2	Persentase peningkatan akses permodalan	Disdagperin		
							3	Persentase industri kecil menengah yang menggunakan teknologi tepat guna	Disdagperin		
							4	Persentase industri kecil menengah yang menerapkan metode produksi berorientasi bisnis	Disdagperin		
				8	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian	Persentase pertumbuhan produk domestik regional bruto sektor pariwisata	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	Disporapar
							2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Disporapar		

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab		
							3	Persentase peningkatan destinasi wisata berkembang di kawasan utara	Disporapar	
							4	Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	Disporapar	
						2	Program Pemasaran Pariwisata	1	Persentase pemasaran destinasi wisata yang berhasil	Disporapar
							2	Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	Disporapar	
						3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif dan ekonomi kepariwisataan	Disporapar
				9	Meningkatnya kenyamanan transportasi	1	Rasio konektivitas Kabupaten	1	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Dishub
								2	Persentase kepemilikan Kir angkutan umum	Dishub

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab					
							3	Persentase sarana dan prasarana pendukung angkutan aglomerasi yang tersedia	Dishub				
					2	Persentase jalan dalam kondisi mantap	1	Program Penyelenggaraan Jalan	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	DPU PR		
							2	Persentase infrastruktur jalan berkondisi mantap yang menghubungkan pusat pertumbuhan di utara		DPU PR			
							2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Persentase drainase dalam kondisi baik	DPU PR		
		2	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	1	Menurunnya pengangguran	1	Tingkat pengangguran terbuka	1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja	Dinkopnaker
									2	Persentase peningkatan fasilitasi pelatihan kerja bagi usia produktif masyarakat tidak mampu		Dinkopnaker	

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
						2 Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Dinkopnaker
					2 prosentase peningkatan Kepatuhan perusahaan atas hak hak pekerja	1 Program Hubungan Industrial	1 Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Dinkopnaker
							2 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Dinkopnaker
							3 Persentase perusahaan yang memenuhi hak pekerja dan kebebasan berserikat	Dinkopnaker
							4 Prosentase perusahaan yang mempekerjakan penduduk boyolali termasuk difabel	Dinkopnaker
				2 Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian	1 Persentase koperasi yang sisa hasil usahanya meningkat	1 Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase peningkatan SDM Koperasi yang terlatih	Dinkopnaker
						2 Program Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi	Persentase koperasi yang di bina yang meningkat nilai kesehatannya	Dinkopnaker

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab			
					2	Jumlah usaha mikro yang meningkat omzetnya	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	1	Jumlah pengembangan usaha mikro	Dinkopnaker
							2		2	Persentase rata-rata peningkatan omzet pelaku usaha mikro	Dinkopnaker
							2	Program Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	1	Persentase peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terlatih	Dinkopnaker
									2	Persentase pelaku usaha kecil dan menengah yang menerapkan metode produksi sesuai standar	Dinkopnaker
									3	Persentase usaha mikro masyarakat tidak mampu yang berkelanjutan	Dinkopnaker
									4	Persentase pelaku usaha mikro yang difasilitasi	Dinkopnaker

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
2	Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya	1 Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	1 Indeks Pembangunan Manusia	1 Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	1 Prosentase pembinaan cabang olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1 Cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik	Disporapar
							2 Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Disporapar
							3 Cakupan pembinaan atlet muda	Disporapar
							4 Cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik	Disporapar
							5 Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Disporapar
							6 Cakupan pembinaan atlet muda	Disporapar
					2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1 Persentase organisasi pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	Disporapar
							2 Persentase kelompok pramuka aktif	Disporapar

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab		
							3	Persentase organisasi pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Disporapar	
							4	Persentase kelompok pramuka aktif	Disporapar	
				2: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	1	Program pembinaan perpustakaan	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Dinarpus
							2	persentase perpustakaan sesuai standar nasional	Dinarpus	
							3	Survei kepuasan masyarakat layanan perpustakaan	Dinarpus	
						2	Program pengelolaan pendidikan	1	APM SD	Disdikbud
								2	APM SMP	Disdikbud
								3	Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Disdikbud

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab		
							4	Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A	Disdikbud	
							5	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Disdikbud	
							6	APK PAUD	Disdikbud	
							7	Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi	Disdikbud	
						3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi	Disdikbud	
						4	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase peningkatan alokasi beasiswa pendidikan tinggi yang tepat sasaran	Setda	
				3	Meningkatnya nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan		1	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	Disdikbud
					Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan		2	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase kelompok seni yang dibina	Disdikbud

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
						3 Program pengelolaan permuseuman	Persentase koleksi museum dalam kondisi baik	Disdikbud
						4 Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase peningkatan faslilitasi kegiatan keagamaan	Setda
				4 Meningkatkan pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total	1 Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera di setiap kecamatan yang aktif	DP2KBP3A
						2 Program pembinaan Keluarga Berencana	1 Persentase peserta KB aktif	DP2KBP3A
							2 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi	DP2KBP3A
						3 Program pengendalian penduduk	1 Rata-rata usia kawin pertama wanita	DP2KBP3A
							2 Presentase perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	DP2KBP3A

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
				5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	1 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1 Persentase rumah sakit terakreditasi	Dinkes
							2 Persentase Puskesmas terakreditasi	Dinkes
							3 Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil	Dinkes
							4 Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Dinkes
							5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes
							6 Persentase Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dinkes
							7 Jumlah kematian balita	Dinkes
							8 Persentase Balita Stunting	Dinkes
							9 Persentase balita gizi kurang	Dinkes

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab	
							10	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Dinkes
							11	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human Immunodefisiensi virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinkes
							12	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Dinkes
							13	Persentase penderita <i>Diabetes Militus</i> yang mendapat pelayanan sesuai standar	Dinkes
							14	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinkes
							15	Angka kesakitan Covid-19	Dinkes

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
							16 Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinkes
							17 Persentase Orang usia Produktif 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Dinkes
							18 Jumlah kematian warga negara usia produktif	Dinkes
							19 Cakupan warga negara usia lanjut 60 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinkes
							20 Kabupaten sehat	Dinkes
							21 Jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (premi non DTKS)	Dinkes
							22 Persentase Desa/ Kelurahan STBM	Dinkes

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab		
							23	Persentase penyediaan fasilitas buang air besar/bersama-sama bagi rumah tangga miskin	Dinkes	
						2	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi (pendidikan minimal D3 Kesehatan)	Dinkes	
						3	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	1	Persentase makanan Minuman yang lolos uji	Dinkes
								2	Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	Dinkes
						4	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1	Persentase Desa/ Kelurahan siaga aktif mandiri	Dinkes
								2	Persentase Desa/ Kelurahan yang menerapkan GERMAS	Dinkes
						5	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase capaian SPM RS	RSUD	

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
		2 Meningkatkan ketahanan sosial	1 Indeks Resiko Bencana (IRB)	Menurunnya resiko bencana	Indeks kapasitas	1 Program Penanggulangan Bencana	1 Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD
	2 Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						BPBD	
	3 Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						BPBD	
	2 Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satpol PP				
			2 Angka konflik Sosial	Meningkatnya kohesivitas sosial masyarakat	Angka Potensi konflik sosial	1 Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1 Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan	Satpol PP

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab	
							2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Satpol PP
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Angka konflik yang ditangani	Bakesbangpol
						Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (tidak mendukung investasi scr langsung)		Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Bakesbangpol
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		Persentase penanganan potensi konflik keagamaan	Bakesbangpol
						Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		Persentase Masyarakat yang paham terhadap pembinaan Ormas	Bakesbangpol

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
						Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase penanganan fasilitasi bidang politik dalam negeri	Bakesbangpol
		3 Meningkatkan Keberdayaan Sosial	1 Indeks Pemberdayaan Gender	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	1 Angka kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	1 Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani	DP2KBP3A
							2 Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (per 100 rb)	DP2KBP3A
					2 Status Kabupaten Layak Anak	1 Program pemenuhan hak anak	1 Persentase fasilitas publik layak anak	DP2KBP3A
							2 Persentase desa layak anak	DP2KBP3A
						2 Program Perlindungan Khusus Anak	1 Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	DP2KBP3A
							2 Rasio korban kekerasan terhadap anak (per 100 rb)	DP2KBP3A
					3 Tingkat partisipasi ngkatan kerja	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1 Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja APBD	DP2KBP3A

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab	
							2	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	DP2KBP3A
			2	Angka PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Peningkatan keberdayaan PMKS	1	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
								Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinsos
							2	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Dinsos
							3	Persentase PMKS lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Rumah Singgah	Dinsos
							4	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinsos

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
						2 Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang bersertifikat	Dinsos
						3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial	Dinsos
							Persentase penerima bantuan sosial yang tepat sasaran	Dinsos
							2 Persentase warga miskin yang mendapatkan pelayanan pengobatan di puskesmas/ poliklinik/ Rumah Sakit	Dinsos
							3 Persentase PMKS yang memperoleh pelatihan	Dinsos
						4 Program pemeliharaan taman makam pahlawan	Cakupan pengelolaan TMPN sesuai standar	Dinsos
						5 Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinsos

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
			3 Indeks Desa Membangun	Meningkatnya keberdayaan desa	Persentase kenaikan status desa	1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Dispermasdes
							2 Persentase Badan usaha milik Desa yang berkembang	Dispermasdes
							3 Persentase peningkatan Posyantek Desa	Dispermasdes
							4 Persentase Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif	Dispermasdes
						Program peningkatan kerjasama desa	Jumlah kawasan perdesaan yang dikembangkan	Dispermasdes
3	Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional	1 Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	1 Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian	1 Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1 Persentase pembudi daya ikan kecil yang diberdayakan	Disnakkan
							2 Persentase peningkatan produksi benih ikan	Disnakkan
							3 Persentase Kelompok Pembudidaya Perikanan yang Menggunakan Metode Budidaya yang Baik (Klp)	Disnakkan

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
						2 Program Pengelolaan perikanan tangkap	1 Persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode penangkapan ikan yang baik dan benar	Disnakkan
							2 Persentase nelayan kecil yang diberdayakan	Disnakkan
						3 Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan	Disnakkan
					2 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Disnakkan
							2 Persentase produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar ASUH	Disnakkan
						2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1 Presentase sampel obat hewan yang diperiksa	Disnakkan
							2 Persentase peningkatan ketersediaan prasarana peternakan	Disnakkan

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab		
							3	Persentase peningkatan ketersediaan sarana peternakan	Disnakkon	
							4	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	Dispertan	
							5	Produktifitas pertanian per ha/tahun	Dispertan	
							6	Persentase bantuan sarana pertanian yang tepat sasaran (petani penggarap, buruh tani, petani lahan kecil)	Dispertan	
						3	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1	Persentase luasan lahan terkena bencana yang tertangani	Dispertan
							2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Dispertan	
							3	Persentase Petani yang mendapatkan asuransi pertanian	Dispertan	
						4	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Dispertan	

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab			
						5 Program Pengelolaan Sumber daya air	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	DPUPR			
						6 Program perizinan usaha pertanian	Persentase usaha peternakan yang mempunyai izin usaha	Dispertan			
				2	Meningkatnya kualitas susu	Jumlah perusahaan yang menerima produk susu boylali	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase susu yang memenuhi standar mutu	Disnakkan		
				3	Meningkatnya agro industri susu	1	Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Produk olahan Susu yang dipasarkan	Disdagperin	
						2	Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase industri kecil menengah Susu yang meningkat produktifitasnya	Disdagperin	
				4	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	1	Program Peningkatan Diservikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1	Persentase Cadangan Pangan	DKP
									2	Persentase Ketersediaan informasi Distribusi Pangan yang dapat diakses masyarakat	DKP

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab		
							3	Persentase Peningkatan kelompokusaha mikro kecil dan menengah yang melaksanakan diversifikasi Pangan	DKP	
							2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan lumbung pangan dalam kondisi baik	DKP
							3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan desa rawan pangan	DKP
							4	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pangan yang aman (layak konsumsi)	DKP
4	Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	1 Meningkatkan integritas dan kapasitas pemerintah daerah	1 Indeks Profesionalitas Pegawai	1 Program Kepegawaian daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	BKP2D	
							2	Persentase pegawai yang memenuhi target SKP	BKP2D	
							3	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	BKP2D	

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
						2 Program pengembangan SDM	1 Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	BKP2D
							2 Rasio pegawai pendidikan tinggi	BKP2D
							3 Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan diklat	BKP2D
					2 Nilai survei penilaian integritas	1 Program Penyelenggaraan Pengawasan Daerah	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Inspektorat
						2 Program Perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi	1 Capaian Nilai MCP Kab. Boyolali oleh KPK	Inspektorat
							2 Indeks Manajemen Resiko	Inspektorat
							3 Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Inspektorat
				2 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Nilai SAKIP	1 Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah	1 Persentase capaian target program	BP3D
							2 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah	BP3D

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab	
						2	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	1 Persentase keterpaduan antar dokumen RPJMD dengan RKPd	BP3D
								2 Persentase kesesuaian antara RKPd dan Renja	BP3D
						3	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase penyediaan data sektoral yang berkualitas	Diskominfo
						4	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah	1 Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP minimal 80	Setda
								2 Persentase IKU kepala Daerah yang mencapai target	Setda
					2	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Program Pengelolaan arsip	Nilai audit kearsipan	Dinarpus
							2 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Cakupan arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Dinarpus
							3 Program penunjang urusan pemerintahan Daerah	1 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai Reformasi Birokrasi minimal baik	Dinarpus

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab		
							2	Persentase perangkat Daerah dengan tata laksana baik	Dinarpus	
						4	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1	Persentase kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Setda
							2	Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan, baik di Provinsi maupun di Pemerintah Pusat	Setda	
					Nilai EKPPD	1	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Sekretariat DPRD
						2	Program administrasi pemerintahan desa	1	Persentase desa yang tertib administrasi	Dispermasdes
							2	Persentase desa yang menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan	Dispermasdes	
						3	Program penataan desa		Persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan	Dispermasdes

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab		
						4	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	Setda	
						5	Perekonomian dan Pembangunan	1	Persentase kebijakan strategis bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Setda
								2	Persentase kontribusi BUMD pada PAD	Setda
									Persentase kebijakan strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Setda
								3	Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	Setda
						6	Program penelitian dan pengembangan Daerah	1	Persentase <i>policy brief</i> bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	BP3D
								2	Persentase inovasi yang difasilitasi	BP3D

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
				3 Meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah	1 Opini BPK	1 Program penyelenggaraan pengawasan	1 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Inspektorat
							2 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	
						2 Program Pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Aturan	BKD
						3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Daerah yang diinventarisasi	BKD
					2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ketercapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	BKD
							2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
								2 Persentase penyediaan anggaran sesuai ketentuan
					4 Terwujudnya <i>smart governance Boyolali</i>	1 Indeks SPBE	1 Program aplikasi informatika	1 Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab			
							2	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	Diskominfo		
							2	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Diskominfo		
					2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program informasi dan komunikasi publik	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Diskominfo	
							2	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi	Diskominfo		
				5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah	1	Persentase satuan/unit yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat dengan kategori Baik	Setda

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab		
							2	Cakupan layanan protokol dan komunikasi pimpinan sesuai standar	Setda	
							3	Persentase kualitas pelayanan publik yang baik	Setda	
							4	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Kecamatan	
						2	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Kecamatan	
						3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Kecamatan
							2	Presentase stimulus bagi masyarakat miskin/berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan	Kecamatan	

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab		
						4	Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti	Kecamatan	
						5	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu	Kecamatan	
						6	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase peningkatan data kependudukan yang diupdate	Disdukcapil	
						7	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	Disdukcapil	
						8	Program pendaftaran penduduk	1	Persentase peningkatan kepemilikan e-kartu tanda penduduk	Disdukcapil
					2			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kartu identitas anak	Disdukcapil	
					3			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kartu keluarga	Disdukcapil	

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab					
						9	Program pencatatan sipil	1 persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian	Disdukcapil				
								2 Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	Disdukcapil				
					6	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Perangkat Daerah				
					7	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD				
5	Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing	1	Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Persentase perusahaan yang mengelola air limbah sesuai ketentuan	DLH
								2	Persentase sumber air yang dikonservasi	DLH			
								2	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	Persentase Limbah bahan berbahaya dan beracun yang terkelola	DLH		

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
						3 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia sebagai dasar penyusunan kebijakan	DLH
						4 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase aduan lingkungan hidup yang ditangani	DLH
				2 Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Persentase sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu (SO2 dan NO2)	DLH
							2 Persentase sumber emisi yang memenuhi baku mutu	DLH
							3 Persentase Kampung Iklim yang terfasilitasi	DLH
				3 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luasan ruang terbuka hijau publik wilayah kota/ kawasan perkotaan/ ketersediaan luasan ruang terbuka hijau publik sebesar 20 dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	DLH

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab					
			2	Indeks <i>Smart City</i>	1	Meningkatnya penanganan/ pengelolaan sampah	Persentase sampah yang tertangani/ terkelola	Program Pengelolaan Persampahan	1	Persentase cakupan area pelayanan sampah	DLH		
									2	Persentase sampah yang dikelola dengan 3R	DLH		
					2	Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis smartness	1	Persentase layanan publik dan pengaduan <i>online</i> yang aktif	Program Aplikasi Informatika		Persentase perangkat Daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i>	Diskominfo	
							2	Luas Kawasan Kumuh	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1	Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik	DPKP	
										2	Persentase rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dibangun	DPKP	
									1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan embung terbangun	DPU PR

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
						2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Persentase rumah tangga yang terlayani Air bersih perpipaan dan terlindung	DPU PR
							2 Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	DPU PR
							3 Persentase rumah tangga miskin yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	DPU PR
							4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPU PR
							5 Persentase Peningkatan ketersediaan sanitasi individual	DPU PR
							6 Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	DPU PR

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab				
				3	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	1	Program Pengembangan Perumahan	1	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	DPKP	
									2	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten	DPKP	
							2	Program Kawasan Permukiman	1	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	DPKP	
									2	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	DPKP	
									3	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	DPKP	
										Persentase penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin	DPKP	
				4	Meningkatnya kualitas bangunan dan penataan ruang	1	Persentase bangunan yang sesuai standar	1	Program Penataan Bangunan Gedung		Persentase gedung yang dibangun dalam kondisi baik	DPU PR

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Penanggung Jawab
						2 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase lingkungan gedung perkantoran dalam kondisi baik	DPU PR
						3 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase surat izin usaha jasa konstruksi terbit tepat waktu	DPU PR
						4 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani	DPU PR
					2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai izin tata ruang	DPU PR

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT